

TNI Kejar Anggota KKB yang Menembak Sopir Angkot di Paniai

JAKARTA (IM) - Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto mengatakan, pihaknya tengah mengejar anggota Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang menembak sopir angkot dan kemudian membakar jasadnya. Korban bernama Rusli.

Tindak keji anggota KKB ini terjadi Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai, Papua Tengah, Selasa (11/6) siang.

"Ya kita sedang kejar," ujar Agus saat berada di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (12/6).

Agus menyebut, Organisasi Papua Merdeka (OPM) masih terus melakukan teror terhadap masyarakat. Agus menceritakan, setelah korban ditembak, mobil yang digunakan juga dibakar.

"Kelompok OPM tersebut masih membuat teror ke masyarakat. Baru-baru ini menembak sopir taksi ya dan setelah ditembak mobil Avanza-nya dibakar,"

paparnya.

Agus menegaskan bahwa saat ini proses pengejaran masih berlangsung. Pasukan TNI belum menangkap pelaku penembakan.

"Belum (tertangkap), dalam pengejaran," kata Agus.

Kepala Operasi Damai Cartenz-2024 Kombes Faizal Ramadhani menyebutkan, beberapa warga sekitar pukul 13.30 WIT, Selasa (11/6), berjalan dari arah Kampung Enarotali hendak ke Kampung Kopo, Distrik Paniai Timur, melihat satu unit mobil berada di pinggir jalan. Mobil itu terbakar dan sopirnya dalam keadaan tersungkur di dalam mobil serta terdengar bunyi suara tembakan.

Kemudian, dari semak-semak pinggir jalan muncul 10 orang anggota KKB yang membawa senjata api laras panjang. Masyarakat yang hendak melakukan perjalanan pun ketakutan dan berbalik arah. ● mei

Majelis Rakyat Papua Harap Diundang Upacara 17 Agustus di IKN

JAKARTA (IM) - Majelis Rakyat Papua (MRP) meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengundang mereka untuk ikut upacara HUT ke-79 RI di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, pada 17 Agustus 2024. Permintaan ini disampaikan Ketua MRP Papua Tengah dan Koordinator MRP se-Papua, Agustinus Anggaibak, ketika bertemu dengan Kepala Negara di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (12/6).

"Kami mendukung pembangunan IKN dan kami juga mohon kepada Bapak Presiden tadi bahwa kami minta dihadirkan untuk upacara 17 Agustus 2024 yang akan nanti berlangsung di IKN," kata Agustinus usai bertemu Jokowi, Rabu (12/6).

"Sehingga ke depan mungkin pimpinan MRP setanah Papua itu bisa diundang, bisa ambil bagian dalam upacara kemerdekaan pada 17 Agustus 2024 nanti di IKN."

MRP merupakan lembaga kultural setingkat DPR Papua yang dibentuk secara resmi oleh negara. Dengan demikian, MRP ingin hadir dalam acara kenegaraan bersejarah, yaitu upacara 17 Agustus pertama di IKN.

"Karena itu juga kami

ambil bagian dalam upacara kemerdekaan bangsa ini, itu tidak ada masalah. Jadi kami minta untuk Bapak Presiden mengundang kami untuk hadir supaya kita sama-sama merayakan 17 Agustus itu di IKN karena itu ibu kota baru," ucapnya.

Selain soal upacara, Agustinus menyampaikan sejumlah aspirasi MRP lainnya, termasuk pemekaran kembali wilayah Papua, yaitu Kabupaten Mimika Timur dan Mimika Barat. Agustinus mengatakan, pemekaran Provinsi Papua yang sudah teralisasi memiliki dampak baik untuk masyarakat Papua, baik dari peningkatan pembangunan wilayah maupun pembangunan ekonomi.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy sebelumnya mengatakan, upacara di IKN dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo dan didampingi oleh Presiden Terpilih Prabowo Subianto. Sementara upacara di Istana Kepresidenan Jakarta akan dipimpin oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan didampingi oleh Wakil Presiden Terpilih Gibran Rakabuming Raka. ● han



FOTO: ANT

SIDANG LANJUTAN KASUS PEMERASAN DAN GRATIFIKASI DI KEMANTAN

Terdakwa kasus pemerasan dan gratifikasi di Kementerian Pertanian yang juga mantan Sekjen Kemantan Kasdi Subagyo (kiri) saat menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (12/6). Sidang beranda mendengarkan keterangan saksi ahli yang dihadirkan terdakwa.

Almarhum Permadi Pernah Ramal Prabowo Jadi Presiden

JAKARTA (IM) - Mantan anggota DPR RI periode 2004-2009 Permadi meninggal dunia di RS Siloam Asri, Jakarta Selatan, Rabu (12/6).

Berdasarkan pantauan di lapangan, sekitar pukul 12.50, Rabu (12/6), jenazah Permadi diberangkatkan ke Kompleks Pemakaman San Diego Hills, Karawang, Jawa Barat.

Nampak sejumlah kerabat dan keluarga mengangkut keranda untuk dimasukan ke dalam mobil ambulans. Sejumlah pelayat pun melepas mending Permadi pemakaman San Diego Hills.

"Ini sekarang kita berangkat ke San Diego Hills, di sebelah makam ibu," kata putra ketiga Permadi SH, Tori Permadi, kepada wartawan di rumah duka, Jalan Pangadegan Barat Raya 41, Jakarta.

Permadi sebelumnya dikenal sebagai politikus

PDIP dan menjadi anggota DPR, Permadi merupakan parapsikolog, atau yang biasa khalayak umum sebut sebagai paranormal. Permadi, bahkan pernah meramal bahwa Prabowo Subianto akan menjadi Presiden Indonesia. Kala itu, pada Pilpres 2009, ia mengatakan bahwa pasangan Megawati-Prabowo akan memenangkan Pilpres melawan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-Budiono.

Ia mengatakan bahwa Megawati sesaat setelah terpilih akan menyerahkan jabatan Presiden kepada Prabowo Subianto.

Diketahui, Permadi merupakan anggota MPR-RI, anggota DPR Komisi I 2004-2009. Semasa kiprahnya, Permadi pernah bernaung di PDIP. Terakhir, ia pernah menduduki jabatan sebagai anggota Dewan Kehormatan DPP Partai Gerindra. ● mei

2 | Polhukam

FOTO: ANTARA



RAKER DPR DAN KEMENKUMHAM

Menkumham Yasonna H. Laoly berbicara dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/6). Raker tersebut membahas rencana kerja anggaran 2025, penjelasan hasil pemeriksaan BPK Tahun 2022, dan penjelasan kebutuhan anggaran Kanwil hasil kunjungan kerja reses.

PBNU Sebut Salam Lintas Agama Demi Kerukunan Umat, Bukan Ibadah

Menurut Ketum PBNU penggunaan salam saat berpidato tak selalu bermakna ibadah, melainkan bisa menjadi tanda kerukunan antarumat beragama.

JAKARTA (IM) - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf menegaskan, salam lintas agama kerap digunakan dalam berbagai tradisi keagamaan tidak selalu dianggap sebagai bagian dari ibadah formal.

Yahya menegaskan hal ini sebagai respon fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan semua salam termasuk dalam ibadah. Menurut Yahya, hal itu tidak tepat. "Karena ada klaim bahwa Assalamu'alaikum adalah ibad-

dah, maka diklaim salam yang lain juga ibadah. Padahal tidak ada ibadah itu," ujar Yahya dalam Halaqah Ulama yang diselenggarakan RMI PBNU, di kantor PBNU Jakarta, Selasa (11/6), dikutip keterangan resmi.

Halaqah tersebut menyikapi fatwa MUI terkait ijtima ulama soal larangan salam lintas agama Yahya menekankan bahwa penggunaan salam dalam pidato atau pertemuan tidak selalu bermakna ibadah, melainkan bisa menjadi tanda kerukunan

antarumat beragama.

"Saya ajukan pertanyaan, apakah boleh memulai pidato dengan ungkapan yang secara simbolis dimaksudkan untuk menunjukkan kerukunan antarumat beragama?" kata keponakan Ahmad Mustofa Bisri itu.

Yahya juga menyoroti pentingnya perubahan pola pikir di kalangan ulama dan pemikir Islam soal lintas agama. Ia menilai bahwa sebagian besar fuqaha masih terpengaruh oleh pola pikir era Turki Utsmani, dan belum sepenuhnya menginternalisasi konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Ke depan ini menjadi krusial lagi karena sekarang ini berbagai aktor yang sangat kuat bertarung melakukan mainstreaming dari gagasan-

gagasan agar menjadi mindset dari masyarakat," ungkapnya.

Pria yang akrab dipanggil Gus Yahya, mengajak semua pihak untuk berpikir jernih dan tidak terjebak dalam upaya mainstreaming yang tidak jelas asal-usulnya sehingga seolah-olah gagasan tersebut merupakan bagian dari fatwa agama.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua PBNU Ulil Abshar Abdalla menegaskan, salam lintas agama yang diucapkan saat seseorang berpidato adalah wujud dari upaya memupuk persaudaraan ke-

bangsaan.

Ia menegaskan bahwa persaudaraan kebangsaan atau ukhuwah wathaniyah merupakan salah satu dari trilogi ukhuwah (persaudaraan) yang dikemukakan Rais Aam PBNU 1984-1991.

"Salah satu cara untuk memupuk persaudaraan kebangsaan dunia kebijakan yang ditempuh oleh negara adalah mengadakan salam lintas agama," ungkap Ulil.

"Salam lintas agama itu kan kalau mau diteliti satu persatu ya intinya salam," terangnya. ● mei

Komisi III DPR Dukung Usulan BNPT Tambah Anggaran Jadi Rp877 Miliar

JAKARTA (IM) - Komisi III DPR mendukung usulan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Republik Indonesia (RI) yang minta penambahan anggaran untuk 2025. Penambahan anggaran untuk memuluskan program yang urgen dalam penanggulangan terorisme di Tanah Air.

Penambahan anggaran diusulkan BNPT dari pagu indikatif Rp626,4 miliar menjadi Rp877 miliar. Usulan ini dibahas dalam rapat bersama antara BNPT, Badan Narkotika Nasional (BNN), dan Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI di Senayan, Jakarta, Senin (10/6).

Anggota DPR dari Fraksi Golkar, Supriansa, S.H., M.H., mengapresiasi capaian zero terrorism attack yang terjadi di Indonesia sepanjang 2023 dan menilai usulan dari BNPT sangat rasional untuk didukung. Dia pun mendorong BNPT untuk meminta penambahan dana bila memang dibutuhkan.

"Jangan pernah ragu meminta anggaran yang sebesar-besarnya jajaran BNPT kepada negara demi memberikan jaminan keamanan bagi rakyat Indonesia. Itu yang penting. Karena apapun namanya, negara harus hadir di tengah-tengah masyarakat. Negara harus ada di situ memberikan jaminan keamanan kepada masyarakat," katanya.

Hal yang sama juga disampaikan, dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), yang juga memuji capaian kinerja serta serapan anggaran BNPT yang menurutnya sudah terbilang maksimal.

"Saya apresiasi capaian-capaiannya yang sudah terbukti dalam kurun waktu pagu anggaran tahun 2023 yang lalu. Saya pun ingin mengapresiasi capaian anggaran yang saat ini sudah lebih dari 98%, saya berharap ini isa terus dipertahankan, Pak. Sehingga ke depan apabila ada penambahan anggaran itu bisa

terserap juga dengan baik," katanya.

Demikian juga politisi dari Partai Nasional Demokrat (NasDem), Drs. Y. Jacky Uli, M.H. mendukung penuh terhadap agenda kerja BNPT ke depan dan meminta BNPT untuk jangan ragu mengusulkan anggaran yang lebih besar untuk keamanan bangsa dan negara.

"Untuk penambahan anggaran kita bisa menyetujui usulan ini, kalau perlu lebih jumlahnya, karena ini urusan untuk bangsa dan negara, sehingga tidak perlu ragu-ragu untuk memintanya," ujarnya.

Dalam rapat kerja tersebut, Kepala BNPT RI, Komjen Pol. Prof. Dr. H. Mohammed Rycko Amelza Dahniel, M.Si, mengatakan pagu anggaran BNPT 2025 yang telah ditetapkan mengalami penurunan bila dibandingkan dengan 2024.

"Pagu anggaran BNPT 2025 sebesar Rp626,4 miliar di mana di antaranya di dalamnya ada SBSN (Surat Berharga Syariah Negara). Apabila dikurangi dengan SBSN jumlahnya menjadi Rp428,5 miliar. Turun Rp33 miliar dibandingkan tahun sebelumnya yang berjumlah Rp461,5 miliar," kata Rycko.

Oleh karena itu, untuk memaksimalkan program penanggulangan terorisme tahun depan, BNPT mengusulkan penambahan anggaran kepada Komisi 3 untuk mendanai berbagai program penanggulangan terorisme bidang pencegahan, penindakan, kerja sama internasional.

Program-program yang dimaksud mencakup di antaranya kontra radikalisasi, operasi intelijen, Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT), pemulihan korban, asesmen pengamanan objek vital, deradikalisasi dalam dan luar lapas, operasi intelijen siber, kesiapsiagaan nasional, penegakan hukum, kerja sama internasional. ● han

Alexander Diminta Mundur dari KPK Jika Tak Berhasil Tangkap Harun Masiku

JAKARTA (IM) - Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ditantang berani mengundurkan diri jika tak berhasil menangkap mantan calon anggota legislatif dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) sekaligus buronan kasus suap, Harun Masiku.

Menurut mantan penyidik KPK Yudi Purnomo Harahap, sebaiknya Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mundur dari posisinya apabila dalam sepekan ke depan Harun Masiku tak kunjung tertangkap.

Sebab Alexander sebelumnya menyatakan, KPK akan menangkap buronan kasus dugaan suap penempatan anggota DPR RI periode 2019-2024 itu dalam sepekan ke depan.

"Menantang Alex jika dalam satu minggu ke depan tidak tertangkap, berani enggak dia sebagai pertanggungjawaban moral mengundurkan diri," kata Yudi dalam

keterangannya, seperti dikutip pada Rabu (12/6).

Yudi juga meragukan pernyataan Alex yang menyebut lokasi persembunyian Harun sudah menjadi buron selama empat tahun itu.

"Saya kan tidak (berjanji), semoga," kata Alex saat ditemui awak media di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (12/6).

Alex mengatakan, perubahan harun Masiku merupakan tugas para penyidik. Sebagai pimpinan, pihaknya hanya berharap buron itu segera tertangkap.

"Kalau saya sekarang bilang, semoga besok tertangkap. Sama saja kan, kan itu harapan kita semuanya," ujar Alex.

Mantan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) itu mengatakan, penyidik KPK berusaha mencari Harun Masiku. Selama empat tahun terakhir Harun hilang, tidak berarti KPK tak bekerja memburu Harun. ● han



FOTO: ANT

BEA CUKAI BANYUWANGI MUSNAHKAN ROKOK DAN MIRAS ILEGAL

Puluhan ribu batang rokok ilegal di musnahkan dengan cara dibakar di Kantor Bea Cukai Banyuwangi, Jatim, Rabu (12/6). Bea Cukai Banyuwangi musnahkan 45.920 batang rokok dan 5.015 liter minuman keras tanpa dilengkapi pita cukai hasil penindakan tahun 2023 dan sebagian tahun 2024 senilai Rp237 juta sebagai upaya menekan peredaran barang kena cukai ilegal yang merugikan negara dan masyarakat.